

## Tesis Administrasi Publik

*Buku ini ditulis untuk mengisi kekosongan pustaka ilmu administrasi publik yang membahas kasus-kasus aktual yang terjadi di Indonesia. Pustaka yang ada selama ini cenderung didominasi oleh pustaka yang berasal dari American public administration. Sebagian dari pustaka itu ditulis oleh akademisi dari negara-negara Barat seperti Inggris dan Australia sehingga mereka juga menggunakan kasus-kasus yang berasal dari negaranya. Akademisi dan peneliti di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, umumnya kurang banyak menulis buku teks yang membahas kasus-kasus yang terjadi di lingkungannya. Akibatnya, pustaka administrasi publik yang tersedia lebih banyak membahas konsep dan teori mengenai kasus-kasus yang terjadi di negara-negara Barat, yang dalam banyak hal sering kali kurang relevan dengan problem yang terjadi di Indonesia. Terbatasnya ketersediaan buku teks yang membahas kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di program studi Ilmu Administrasi Publik dan/atau Ilmu Administrasi Negara di Indonesia. Banyak dosen dan staf pengajar yang tanpa mereka sadari lebih banyak mengajarkan "American public administration", bukan ilmu administrasi publik yang relevan untuk menjawab problem yang terjadi di Indonesia. Konsep dan teori administrasi publik yang didiskusikan di kelas lebih banyak berasal dari negara-negara Barat, yang jika tidak dibaca dan dimanfaatkan secara kritis dapat menimbulkan problem baru. Fenomena administrasi publik umumnya terikat dengan ruang dan waktu. Ia dipengaruhi oleh budaya, sistem pemerintahan, sistem politik, dan kemajuan sosial ekonomi masyarakatnya. Penggunaan konsep dan teori yang berasal dari negara-negara maju di Barat untuk menjelaskan fenomena administrasi publik di Indonesia, jika tidak dilakukan secara hati-hati dan kritis dapat menghasilkan pemahaman yang keliru dan bias. Dengan semangat itulah, buku ini mencoba membahas berbagai isu dan problem yang sekarang ini dihadapi oleh para akademisi dan praktisi administrasi publik, terutama terkait dengan problem praktikal yang sekarang ini dihadapi oleh pemerintah. Ada banyak problem yang sekarang ini dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mentransformasi dirinya menjadi pemerintah berkinerja tinggi, di antaranya: hubungan antara pejabat politik dan pejabat karier, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penerapan birokrasi Weberian yang berlebihan, kualitas regulasi yang buruk, fragmentasi kelembagaan dan kekuasaan, dan kemitraan antara pemerintah dan swasta. Buku ini dirancang untuk mengembangkan konsep dan teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai problem tersebut. Dengan membahas problem dan isu kontemporer yang sekarang ini dihadapi oleh pemerintah, diharapkan buku ini dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan teori administrasi publik kontemporer, yang relevan dan mampu memberi kontribusi terhadap penyelesaian masalah bangsa.*

*Dinamika kehidupan Masyarakat Indonesia dewasa ini terlihat mendapatkan perubahan, baik secara psikologis, maupun nonpsikologis. Masyarakat Indonesia yang dulu terkenal akan kesantunannya, lambat laun telah terjadi pergeseran dinamika perilaku kehidupan masyarakatnya menjadi lebih agresif dan sulit terkendali. Penyebabnya menurut penulis adalah berbagai faktor kebutuhan yang menuntut masyarakat untuk segera terpenuhi, tapi masih jauh dari kemungkinan untuk dipenuhi. Misalkan seperti pemenuhan fasilitas dan sarana pendidikan yang masih jauh dari harapan. Dari berbagai wacana dan pendapat yang muncul kemudian dapat kita rasakan dan lihat bahwa masyarakat Indonesia telah jenuh terhadap perlakuan yang diberikan oleh para penyelenggara negara, yang penulis perhatikan lebih mengedepankan aspek politik terhadap penyelesaian kebutuhan seluruh Masyarakat Indonesia. Pemandangan tersebut merupakan sebuah dinamika nyata, yang mempertemukan antara kebutuhan sosial masyarakat dengan kepentingan politik para penyelenggara negara. Erat kaitannya dengan hal tersebut, maka disini penulis dalam buku ini memaparkan cara pandang masyarakat dan para tokoh akademis dalam melihat dan menilai tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.*

*The International Conference on Fundamental Rights (I-COFFEES) is an international conference organized by the Faculty of Law, Universitas Lampung, to be an international scientific forum for researchers, academics, and practitioners. The first I-COFFEES were held in 2018 at the Novotel Hotel, Bandar Lampung, Indonesia. In 2019, the Second I-COFFEES were held on 5-6 August at the Faculty of Law, Universitas Lampung, Indonesia. "Fundamental Rights" has been chosen for the main theme of the Second I-COFFEES with a focus field on Law and Development, Women and Children, Ethnic and Religion, Law and Public Policy, Local Government, Business Law and Disruption, Pengayoman Law, Village Development and Communal Rights, and International and Human Rights. The conference was attended by national and international delegates from university academics, researchers, and practitioners. In total, there are 71 papers presented, with only 28 papers published.*

*Menurut pandangan humanisme, manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya pada tujuan yang positif dan rasional. Perkembangan kepribadian seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan sosial budaya tempat tumbuh dan berkembangnya seseorang. Setiap orang pasti akan selalu berusaha agar segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan baik sehingga dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Sebagai warga negara, kita tidak boleh hanya berpangku tangan mendiamkan proses pemerintahan yang mengarah pada terancamnya kerusakan peradaban lebih jauh yang menjadi ancaman bagi keberadaan negara-bangsa Indonesia. Di bidang politik, kita menghendaki tegaknya tanggung jawab lembaga-lembaga politik atas mandat yang telah diberikan rakyat kepadanya. Etika administrasi publik merupakan etika yang mengatur bagaimana sebaiknya pelayan-pelayan masyarakat bekerja. Etika ini menuntut para pekerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan tingkah lakunya di kemudian hari. Masih banyak mental bekerja dengan tidak baik yang masih menempel pada pekerja-pekerja administrasi publik ini. Hal ini tidak terlepas dari budaya atau kebiasaan, pembentukan mental yang kurang terasah, dan faktor karakter seseorang. Buku etika administrasi publik ini menyajikan penjelasan-penjelasan mengenai pekerjaan administrasi publik. Dalam buku ini juga dijelaskan dasar-dasar hukum maupun undang-undang yang mengatur jalannya pekerjaan untuk pelayanan publik ini. Selain itu, buku ini juga menyajikan jenis pelanggaran-pelanggaran yang sering kali dilakukan oleh pelayan publik. Tidak hanya jenis pelanggaran, namun juga konsekuensi dari tindakan yang sudah merugikan masyarakat ini. Buku ini sangat sesuai untuk dibaca oleh mahasiswa yang mempelajari Ilmu Pemerintahan seperti Administrasi Negara dan lain-lain. Selain itu, buku ini juga sesuai dibaca oleh para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang makin meningkatkan kualitas dan mental para pelayan publik, mengingat pekerjaan ini akan banyak melibatkan*

*masyarakat.*

## **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI**

***Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia***

***pengetahuan anggaran, budaya kerja dan transparansi publik***

***ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK Telaah Konsep Mewujudkan Birokrasi yang Responsif dan Profesional***

***Kualitas Pelayanan Publik***

***Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik***

Shadow Play examines how members of the urban underclass in Indonesia seek to negotiate their rights to urban space in a country undergoing significant social, political, and economic change.

Buku menguraikan beberapa hal terkait potensi peserta didik. Diawali dengan macam-macam kecerdasan peserta didik, model pengembangan peserta didik di berbagai negara, peran pendidik dalam pengembangan kecerdasan peserta didik dan strategi pengembangan potensi peserta didik berbasis kecerdasan majemuk. Buku ini bertujuan melengkapi referensi yang ada terkait kecerdasan majemuk guna memberikan inspirasi dalam pengembangan potensi didik yang lebih baik. Dengan membaca buku ini, akan mendapatkan informasi dan wawasan yang komprehensif dalam upaya meningkatkan pengembangan potensi peserta didik. Dengan memiliki buku ini akan menjadi bekal bagi pendidik, peserta didik, peneliti dan orangtua dalam melahirkan peserta didik yang berkualitas sesuai potensi mereka masing-masing.

Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini mempunyai arti penting dalam dunia pendidikan. Masyarakat semakin sadar akan kelanjutan menempuh pendidikan jenjang yang lebih tinggi, terutama bagi dosen, guru maupun pegawai. Jenjang pendidikan yang ditempuh adalah Strata Satu (S1) ke jenjang Strata Dua (S2), Strata Dua (S2) ke jenjang Strata Tiga (S3). Faktual di lapangan masih ditemukan mahasiswa semester akhir pada jenjang Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) yang merasakan kegalauan dalam penyusunan tesis dan disertasi. Buku Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) merupakan solusi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pengembangan (Research & Development). Buku ini secara garis besar berisi praperencanaan penelitian, perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan laporan penelitian, serta publikasi penelitian. Buku ini juga memberikan panduan, prosedur serta contoh bagi mahasiswa yang sedang menyusun tesis dan disertasi dari pengalaman penulis yang pernah lakukan.

Setelah kurang lebih satu tahun buku ini diterbitkan, Alhamdulillah buku ini dicetak ulang. Penulis bersyukur bahwa gagasan yang disampaikan dalam buku ini memperoleh sambutan yang baik dari para mahasiswa, pemerhati, dan pakar administrasi publik. Ketika buku ini dicetak ulang penulis mencoba memperkaya pembahasan berbagai isu yang ada di Bab I Mengembangkan Sistem Pelayanan Publik Dalam Negara Kesatuan yang Desentralistik dan Bab V Manajemen Kolaboratif: Kemitraan Antara Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah. Sedangkan Bab-Bab lainnya tidak mengalami perubahan. Revisi Bab I dilakukan untuk memperkaya analisis penulis tentang pembagian urusan pemerintahan terkait dengan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pembagian urusan pemerintahan sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kerancuan pembagian urusan antara susunan pemerintahan menjadi salah satu sumber masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Perubahan dalam Bab ini dilakukan untuk memperjelas pendapat penulis mengenai bagaimana pembagian urusan dalam penyelenggaraan pelayanan dilakukan antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan. Perubahan juga dilakukan dalam diskusi tentang standar pelayanan minimal (SPM). Dalam revisi ini penulis menambahkan penjelasan tentang berbagai sumber kegagalan implementasi SPM dan bagaimana seharusnya perbaikan substansi dan strategi implementasi SPM dilakukan. Revisi Bab V dilakukan untuk menambah penjelasan tentang pengembangan manajemen kolaboratif, yang didalam edisi yang pertama masih sangat minimal. Dalam edisi kedua ini penulis menambahkan penjelasan tentang bagaimana pemerintah dan manajer sektor publik seharusnya memilih mitra kerjasama.

Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Governance, ICONEG 2019, 25-26 October 2019, Makassar, South Sulawesi, Indonesia

Memperoleh Kembali Kenyataan Supaya Memperoleh Masa Depan

**MANAJEMEN PENELITIAN PENGEMBANGAN ( RESEARCH & DEVELOPMENT ) BAGI PENYUSUN TESIS DAN DISERTASI**

**Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia**

**DALAM Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

**Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat**

*Buku ini hadir memberi cara pandang yang secara jelas ingin mengatakan pada khalayak bahwa pengelolaan hutan perlu perubahan mendasar. Dan, perubahan tersebut dapat dilakukan dengan memercayai rakyat mengelola hutan —Budiman Sudjatmiko, M.Sc; M. Phil, Anggota DPR RI Membaca karya ini akan bisa memprovokasi pembaca untuk memikirkan dan mengusahakan bagaimana situasi “Hutan Kaya, Rakyat Melarat”, seperti yang ditulis oleh Peluso, bakal bisa menuju “Hutan Subur, Rakyat Makmur” —Noer Fauzi Rachman, Ph.D, Peneliti Politik Agraria dan Gerakan-gerakan Rakyat Pedesaan Buku ini menjadi salah satu referensi penting bagaimana disiplin Administrasi Publik membedah persoalan hubungan hutan-rakyat tersebut. —Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo; Pengajar pada Fakultas Kehutanan IPB dan Program Pascasarjana IPB dan UI, Anggota WG Tenure dan Presidium Dewan Kehutanan Nasional Ini adalah kesaksian Barid betapa hutan bagi masyarakat tani adalah hidup itu sendiri. Hutan tidak hanya soal sumber penghidupan, juga menjadi akar dan sumber budaya, relasi manusia dan alam yang bersinergi dan berdinamika dalam nalar sejarahnya sendiri —Ahmad Ya'kub, Aktivist di Sekretariat Bina Desa*

*Studi administrasi dan kebijakan publik terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Persilangan disiplin keilmuan memberikan atribusi penting dalam proses perkembangan epistemologi yang berguna untuk eksplorasi keilmuan. Pembahasan dalam buku ini bersifat tinjauan awal untuk diskusi lebih lanjut mengenai perkembangan administrasi dan kebijakan publik melalui berbagai macam pendekatan dan penyigian disiplin berbeda, alih-alih menawarkan justifikasi yang memadai. Tawaran ini memberikan kemungkinan untuk tidak membiarkan teori-teori terbungkam dalam satu bingkai eksklusif, dan mulai mengintegrasikan berbagai disiplin sebagai penyusun konstruksi saintifik, termasuk pengetahuan alam. Buku ini merupakan kumpulan dari beberapa tulisan. Pada bagian awal, kami sengaja melakukan pemisahan antara analisis dan evaluasi kebijakan sebagai pijakan diskursif. Kemudian berlanjut pada preferensi epistemologis yang banyak mengupas analisis wacana yang umumnya digunakan para ahli komunikasi dan antropologi-untuk melengkapi postur dialektis. Pemikir seperti Abel & Sementelli menjadi pintu masuk dalam wacana kewarganegaraan, dimana pendekatan permainan bahasa Wittgenstein memiliki kedekatan dengan keadilan sosial. Sementelli secara partikular mengembangkan eksistensialisme Karl Jaspers yang dikombinasikan dengan metaverse dalam semiotika film maupun permainan digital untuk mengeksplorasi epistemologi administrasi publik. Hal tersebut membuktikan bahwa ilmu administrasi dan kebijakan publik mengalami perkembangan pesat dan selalu terkoneksi dengan berbagai fenomena lingkungan sosial maupun pengetahuan alam. Selain itu, pada beberapa bagian terakhir telah dibahas beberapa contoh penerapan administrasi publik menganalisis situs kontemporer. Meski demikian, sekali lagi buku ini bukan klaim kebenaran postulat bagi sains administrasi dan kebijakan publik, ditengah diversitas pengetahuan. Buku ini hanya menawarkan pandangan interdisipliner, secara epistemologis unsur pengetahuan di luar studi administrasi berfungsi akurat untuk mengatasi berbagai persoalan dalam urusan publik. Selain itu, buku ini memiliki banyak kelemahan; kesalahan di sana sini, dan tampaknya berceceran. Untuk itu, dengan segala kelemahan, para penulis membutuhkan saran dan kritik dari para pembaca, sehingga menjembatani konstruksi pengetahuan di masa mendatang*

Salah satu perubahan yang sangat mendasar dalam revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah ketentuan pengaturan lembaga perbedaan pendapat yang sangat berlainan dengan ketentuan dalam perundangan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ketentuan ini selanjutnya menyebutkan bahwa jika dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Buku ini berasal dari hasil penelitian penulis dan beberapa tulisan yang telah dipublikasi di jurnal, kemudian dilengkapi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Tujuan penulisan buku ini adalah membahas tentang perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan, khususnya berkaitan dengan perkara perdata dan pidana di pengadilan negeri. Pembahasan dalam buku ini meliputi pengadilan negeri dalam sistem kekuasaan kehakiman, pemeriksaan perkara perdata, pemeriksaan perkara pidana, tinjauan umum tentang perbedaan pendapat dan praktik penerapan perbedaan pendapat dalam putusan perkara perdata dan pidana di pengadilan negeri. Oleh karena itu, buku ini akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum pada program S-1 dan S-2, akademisi, para praktisi hukum, serta siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang perbedaan pendapat dalam putusan perkara perdata dan pidana di pengadilan negeri. Buku persembahkan penerbit MediaPressindogroup

Pelayanan publik merupakan bidang tugas pemerintah yang paling menonjol. Seluruh pemerintahan menyediakan pelayanan publik, baik disediakan secara langsung oleh pemerintah sendiri ataupun membayar organisasi swasta untuk menyediakannya. Pelayanan publik penting karena menghadirkan peluang untuk menyelamatkan nyawa, memperbaiki komunitas, mempengaruhi perubahan sosial, dan menyediakan sumber yang signifikan bagi pertumbuhan pribadi (Goldstein, 2020:2). Dalam sistem demokrasi, pemerintah harus disebut gagal jika ia tidak dapat menciptakan lebih banyak nilai publik yang diinginkan warga negara (Vigoda, 2000:166)

I-COFFEES 2019

Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Manajemen Pelayanan Publik:

*Song of My Life*

KESIAPAN PTKIS

MENGEMBANGKAN POTENSI PESERTA DIDIK BERBASIS KECERDASAN MAJEMUK

Masalah yang paling krusial dalam kebijakan adalah tahap implementasi, karena selalu ada kesenjangan antara isi kebijakan (*policy content*) dan lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan (*policy context*). Faktor-faktor yang menentukan besar kecilnya tingkat kesenjangan tersebut, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan EMIS-PTKIS. Untuk menjelaskan masalah tersebut, digunakan kerangka berpikir analisis kebijakan publik terutama dari perspektif implementasinya (George Edward III). Dari perspektif ini, kebijakan EMIS di PTKIS, hanya akan dapat diimplementasikan, jika didukung oleh adanya komunikasi, sumberdaya, kesiapan, dan struktur birokrasi yang tepat dan memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Unit analisis penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu 15 PTKIS di wilayah II Jawa Barat dan Banten, yang dianggap mewakili keseluruhan wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi terkait masalah penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan EMIS kurang efektif, sehingga para pelaksana kebijakan menganggap bahwa; Peran komunikasi belum sepenuhnya tepat waktu, lengkap, relevan, dan komprehensif; Sumber daya, manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan informasi belum bersinergi antara satu dengan yang lainnya, dalam membantu proses manajemen; disposisi belum mendukung, struktur birokrasi, belum mampu meningkatkan kualitas pengelolaan informasi, yang faktual, memberikan timbal balik yang positif terhadap pelayanan mutu terstandarisasi, serta menjadi media komunikasi efektif. Maka penelitian ini merekomendasikan kepada; Pimpinan PTKIS, diharapkan selalu pro aktif melakukan komunikasi internal dan eksternal, Para pelaksana EMIS, sejatinya selalu meningkatkan keahlian; Pemerintah, (Dijen Pendis/Kopertais), untuk merubah paradigma, pola fikir sumber daya manusia agar lebih professional, Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini, dapat dijadikan acuan untk penelitian selanjutnya dalam rangka perbaikan kedepan. Apabila metodologi dan temuan penelitian ini dinilai kredibel dan relevan, maka dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam meneliti kasus sejenis pada lembaga lainnya. Buku ini diinspirasi oleh buku lama karya Almarhum Prajudi Atmosudirdjo sebagai Begawan ilmu Administrasi di Indonesia berjudul "Pengantar Ilmu Administrasi" yang telah lama menjadi buku ajar untuk mahasiswa tingkat sarjana yang hingga kini terasa perlu dibuat up to date dengan perkembangan kekinian. Inspirasi juga datang dengan berdirinya Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia sebagai tempat berkarya bagi penulis dan sebagai penerus Prajudi Atmosudirdjo di bidang administrasi. Kebutuhan akan buku pegangan bagi mahasiswa apakah sarjana, magister atau doktoral untuk memahami konsep administrasi dengan mudah, yang melingkupi pula kedua administrasi baik publik maupun bisnis, juga kian terasa. Jalan Sederhana Memahami Administrasi Publik Dan Bisnis: Antara Teori Dan Praktik ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak Human Resource Management dapat didefinisikan sebagai manajemen yang efektif dari orang-orang dalam suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia membantu menjembatani kesenjangan antara kinerja karyawan dan tujuan strategis organisasi. Selain itu, tim manajemen sumber daya manusia yang efisien dapat memberikan keunggulan bagi perusahaan dalam persaingan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah kesiapan PTKIS setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesiapan PTKIS Jabar-Banten dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, untuk mengetahui apakah PTKIS telah memahami konsep pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapinya dalam rangka pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan wawancara dilakukan dengantahapan-tahapan, yaitu: menggunakan petunjuk umum wawancara dan model wawancara baku terbuka, dan mengambil lokasi di 24 PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar-Banten. Fokus penelitian ini adalah kesiapan PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar-Banten dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, sumber data penelitian ini adalah Perangkat PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar-Banten. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, sedangkan metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar-Banten belum melaksanakan konsep pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah secara penuh karena hal itu belum dilaksanakan oleh PKIS secara maksimal dan optimal sehingga dalam implementasinya pun belum mencapai hasil yang optimal, konsep tersebut perlu didukung oleh lima aspek yang menjadi indikator kesiapan Institusi PTKIS yaitu: (1) aspek kewenangan yang wajib untuk dilaksanakan, (2) aspek desain organisasi yang berimplikasi terhadap profesionalisme kerja, (3) aspek daftar kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan program, (4) aspek kebutuhan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang pelaksanaan program, (5) aspek perencanaan biaya yang matang minimal. Dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar-Banten dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, belum siap dan belum mendukung, dikarenakan masih rendahnya kemampuan SDM dalam hal pengeolaan program, sebagai kendala untuk mencapai hasil yang optimal dan maksimal dalam rangka pelaksanaan Lima aspek yang menjadi indikator pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, walupun disisi lain etos kerja aparatur/pelaksana sangat tinggi. Agar aparatur PTKIS siap dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, maka penelitian ini merekomendasikan agar setiap PTKIS membuat rincian kewenangan dan melaksanakan yang wajib untuk dilaksanakan, setiap perangkat PTKIS bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang berpedoman pada desain organisasi yang ada, setiap perangkat menyusun daftar kebutuhan dalam pelaksanaan program serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program sesuai dengan proporsi dana yang tersedia, dan setiap perangkat hendaknya menyusun perencanaan biaya atau estimasi biaya secara matang sebelum membuat dan melaksanakan program.

**DISKURSUS & DINAMIKA ADMINISTRASI PUBLIK : Tinjauan Kritis dan Reflektif  
Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara  
Reformasi Birokrasi di Nusantara  
Teori & Praktek**

Buku pedoman ini sudah cukup lengkap, dengan memuat tentang sejarah perkembangan FISIP UNDIP, nama-nama pimpinan fakultas, visi-misi fakultan dan program studi, struktur organisasi fakultas, mekanisme pendaftaran mata kuliah, kurikulum masing-masing program studi, jumlah program studi, daftar nama dosen dan karyawan dan lain-lain.

Buku ini dibagi dalam empat bagian, yaitu pengantar, dua bab, dan penutup. Dalam pengantar telah ditetapkan masalah atau problem yang perlu dipecahkan. Dalam Bab 1 dibahas hubungan antara teori dan praktek, yaitu di satu pihak hubungan antara administrasi pembangunan (praktek), dan di pihak lain ilmu Administrasi Pembangunan (teori). Kemudian dalam Bab 2 diterangkan metode penelitian ilmiah yang harus dipakai dalam ilmu-ilmu sosial untuk dapat menghasilkan jenis pengetahuan ilmiah spesifik yang diperlukan itu. Kemudian dalam penutup, akhirnya dinilai kembali hasil (result) yang diperoleh dari upaya memecahkan masalah yang bersangkutan. Sebagai petunjuk untuk pembaca buku ini, barangkali berguna untuk diketahui bahwa pembagian ke dalam empat bagian tersebut berdasar logika pendekatan proses pemecahan masalah yang disajikan.

This book constitutes the thoroughly refereed proceedings of the International Conference on Environmental Governance held in Makassar, Indonesia. The 67 full papers presented were carefully reviewed and selected from 212 submissions. The papers reflect the conference sessions as follows: ICT and Environmental Sustainability, Electronic Environmental Monitoring, E-Government for Environmental System, Environmental law and politics, Sustainable future for human security, Disaster risk reduction, Climate change and adaptive capacity, Islamic environmental thought, Socio-environmental conflicts, Global environmental change, Sustainable development goals (SDGs), Ocean policy and governance, Rural development and planning, Forest governance and conservation, Water and soil conservation, Business and CSR, and Urban vulnerability and resilience.

Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Good Governance. Sistematika buku Good Governance dalam Pelayanan Publik ini mengacu pada pendekatan

konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 11 Bab, diantaranya: Pelayanan Publik; Good Governance; Birokrasi; Otonomi Daerah; Konsep Dasar Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah; Pelayanan yang Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif dan Responsif; Pelayanan Publik Partisipatif; Transparansi Pelayanan Publik; Strategi Reformasi Birokrasi di Indonesia; Serta Kaitan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik.

Kebijakan Publik

Pelayanan Prima Instansi Pemerintah

Spirit Reformasi Birokrasi Publik (Menuju one stop services system)

Proceedings of the 2nd International Conference on Fundamental Rights, I-COFFEES 2019, 5-6 August 2019,

Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Shadow Play

Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip 2020

Administrasi adalah ilmu yang mempelajari negara serta kepentingan publik serta dituntut bertanggung jawab terhadap publik yang dilayaninya. Birokrasi publik pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Tetapi faktanya, banyak birokrat pemerintah yang tidak memiliki kompetensi dan akuntabilitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Birokrasi adalah lembaga yang paling banyak di sorot oleh masyarakat terkait dengan kinerja dan etika. Perhatian masyarakat ditujukan pada praktik yang menyimpang (mal-administration) dari etika administrasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini menunjukkan pentingnya etika dalam administrasi publik. Etika dan tingkah laku manusia saling berkaitan sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Menjadi istri seorang bhayangkara yang sering berpindah-pindah tempat malah semakin menjadikanku kreatif untuk terus berkarya yang dapat mengisi waktu luang sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan semangat dan tekad yang kuat dibarengi dengan ikhtiar dan doa, aku berusaha melakukan yang terbaik, dari menjadi marketing pembiayaan sekaligus pembelian dan penjualan mobil serta yang lainnya sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi ASN. Peran orangtuaku sangatlah besar dalam menjadikanku seperti saat ini di samping dukungan suami dan anak-anak serta keluargaku. Pada kesempatan ini kupersembahkan semangat hidupku dan keyakinan Allah akan bersama kita jika kita selalu bersama Allah Swt., hidup ini akan baik jika kewajiban kita pada Allah kita perbaiki Wallahu a'lam... semoga Allah Swt., senantiasa meridai perjalanan hidupku ini Aaammiiin Ya Rabbal

Alamin. Buku persembahkan penerbit IndieBookcorner

"DR.Ir.H.Fadel Muhammad berhasil membumikan teori-teori penyelenggaraan pemerintahan yang rumit ke dalam praktik dengan logika dan tindakan yang mudah dipahami. Provinsi Gorontalo adalah laboratorium tempat dirinya melakukan eksperimen untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang unggul. Ia mencermati variabel-variabel yang diduga memengaruhi kinerja, antara lain karakteristik daerah, budaya organisasi, dan kapasitas manajemennya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) esis dan semakin kuat jika pemerintah daerah inovatif, kreatif, produktif, dan saling memanfaatkan keunggulan lokal dengan jejaring yang sehat antardaerah. NKRI tidak mungkin dibangun dari Jakarta. -Dr.H.Jusuf S.K, Wali kota Tarakan/Ketua APEKSI"

Teknologi informasi dan komunikasi dipandang sebagai sebuah alat inovatif yang diadopsi oleh pemerintah, sebagai sebuah cara untuk menjadi efisien dan efektif dalam melakukan inovasi birokrasi dan administrasi publik di pemerintahan. Buku ini membahas administrasi publik dan inovasi birokrasi yang selaras dengan perkembangan informasi teknologi dengan fokus mengembangkan administrasi negara dan inovasi birokrasi dalam pemerintahan. Bagian pertama dari buku ini membahas dan menganalisis secara global pada publik administrasi dan informasi teknologi inovasi. Buku ini juga akan membahas tentang keterbukaan pemerintah, perspektif media sosial, demokrasi, dan tantangan manajemen komunikasi publik. Dalam Bab 1 akan membahas tentang keterbukaan pemerintah, yang bisa digunakan oleh sebuah demokrasi untuk memfasilitasi lebih banyak transparansi dan pemerintahan yang kolaboratif.

Pada Bab 2 membahas tentang strategi administrasi publik dan evaluasi terbaik dalam penerapan inovasi birokrasi. Dalam Bab 3 menjelaskan analisis dari lintas negara dengan teknik statistik pemodelan persamaan struktural untuk menguji dampak tentang perkembangan e-government dan dieksplorasi faktor hubungannya. Pada Bab 4 membahas tentang publik administrasi negara Italia menggunakan demokrasi partisipatif berbasis partisipasi online dan dilihat dengan perspektif politik kontemporer dan administrasi publik. Dalam Bab 5 menganalisa penerapan sosial media pada administrasi publik, memeriksa teori yang mendukung penggunaan dari sosial media, penggunaan utama dari teknologi untuk administrasi publik di masa depan. Pada Bab 6 membahas tentang e-government dan mempertimbangkan apakah e-government sebagai produk inovatif untuk sektor publik dan menyarankan e-government sebagai produk inovasi pengelolaan birokrasi. Di bab ini, masing-masing teori dibahas dan spekulasi dibuat untuk penyelarasan komunikasi dalam inovasi birokrasi. Dalam Bab 7 menyediakan wawasan lebih dalam terkait strategi penyelarasan teknologi informasi dan administrasi publik yang berkaitan dengan organisasi publik berdasarkan pada sebuah penilaian dari bukti-bukti empiris. Oleh karena itu, Buku ini penting untuk dijadikan suatu pengantar dalam administrasi publik, komunikasi publik dan inovasi birokrasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Kajian Kritis pada Sistem Pelayanan Publik di Indonesia

Administrasi Publik dan Inovasi Birokrasi : Sebuah Pengantar

Teori dan Aplikasi Dalam Peningkatan Kinerja

Kajian Konsep, Kebijakan dan Implementasi

Jalan Menuju Hutan Subur Rakyat Makmur

Information Politics in Urban Indonesia

*Sudah lama penulis ingin menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang berbagai isu strategis dalam mendorong reformasi di sektor publik. Pengalaman melakukan kegiatan konsultasi di berbagai lembaga donor untuk membantu pemerintah dalam mendorong reformasi sektor publik memberi akses yang besar kepada penulis untuk melakukan riset terkait dengan pembagian urusan pemerintah, standar pelayanan minimal, dan reformasi aparatur sipil negara di daerah. Sebagian bab yang ada di dalam buku ini adalah policy paper yang ditulis untuk pemerintah dan lembaga donor untuk mendorong percepatan reformasi sektor publik terutama terkait dengan pembaruan desentralisasi dan praktik governance di daerah. Publikasi buku ini diharapkan dapat memperluas gagasan dan pemikiran tentang reformasi sektor publik untuk memastikan desentralisasi membawa manfaat bagi masyarakat di daerah. Buku ini diharapkan mampu memberi inspirasi kepada semua pihak terutama para akademisi, mahasiswa, dan administrator publik tentang betapa banyaknya isu kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mempercepat reformasi administrasi publik. Indonesia segera memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kemampuan bangsa untuk menghadapi era tersebut sangat ditentukan oleh pembaruan sektor publik yang dilakukan. Jika reformasi sektor publik dapat dilakukan secara efektif, kita mungkin bisa lebih percaya diri untuk memanfaatkan MEA demi kesejahteraan rakyat.*

*Berangkat dari pengalaman mengajar di kelas pada saat kuliah Metodologi Penelitian khususnya, selalu saja kekurangan waktu untuk menjelaskan materi kuliah yang bersangkutan, sementara disisi lain masih banyak materi yang harus disampaikan kepada mahasiswa, sehingga akhirnya dosen harus memilih apakah memilih materi yang disampaikan sedikit tetapi mahasiswa memahami semua yang disampaikan, atau memilih menyampaikan semua materi, tetapi konsekuensinya mungkin banyak mahasiswa yang tidak faham. Untuk itu*



adanya Buku Ajar ini sedikit dapat membantu dosen dan mahasiswa untuk menemukan jalan tengah, artinya tidak semua materi harus disampaikan dikelas, bagian dari materi yang kira-kira bisa difahami oleh mahasiswa hanya dengan membaca sendiri, maka dapat hanya dengan membaca di Buku Ajar ini, dengan demikian semua materi yang sudah direncanakan oleh dosen di 14 kali pertemuan per semester tersebut dapat disampaikan semua dengan tuntas. Sebagai pengayaan tambahan maka di kelas, perlu dibuka "ruang" diskusi bagi mahasiswa yang belum faham setelah membaca Buku Ajar ini. Buku Ajar ini coba penulis tuliskan dengan menggunakan Bahasa "kampung" tujuannya adalah agar apa yang ditulis dalam buku ini mudah difahami oleh siapa saja. Disamping itu berbagai materi yang ditulis dalam Buku Ajar ini adalah kombinasi teori dan praktik, sehingga isi buku ini lebih mengarah kepada pragmatis, khususnya dalam konteks penelitian akademik (Skripsi, Tesis dan Disertasi). Akhir kata, karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan serta pengalaman penulis, khususnya dalam bidang ilmu Metodologi Penelitian, maka buku ini tentu masih jauh dari sempurna seperti kata pepatah tiada gading yang tak retak, untuk itu segala kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangatlah penulis diharapkan guna penyempurnaan buku ini dimasa yang akan datang. Pontianak, Desember 2019 Penulis

Buku yang tersaji ini adalah hasil pengembangan bahan ajar dan kajian dari literatur-literatur mengenai etika administrasi (birokrasi), Agile governance dan kebijakan Publik. Untuk itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat yang menggeluti dunia birokrasi pemerintahan dan politik praktis agar tidak menyimpang dari tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Buku ini menekankan pada upaya pengkajian terhadap sejarah lengkap asal-usul dan perkembangan studi dan praktik kebijakan publik. Penekanannya lebih kepada keterampilan berpikir, khususnya bagi mahasiswa. Di samping itu, melalui buku ini juga dibahas tipe-tipe analisis dalam kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain, buku ini juga dilengkapi dengan beberapa pendekatan dan sejumlah metode analisis yang digunakan dalam mengkaji kebijakan publik. Selain hal tersebut, juga diuraikan tentang landasan dan latar belakang filosofis, sosiologis, dan politis di balik perkembangan kebijakan publik di berbagai kawasan.

REINVENTING LOCAL GOVERNMENT, PENGALAMAN DARI DAERAH

Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus

Gender dan Kehutanan Masyarakat (Kajian Implementasi Pengarusutamaan Gender di Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan)

ADMINISTRASI PUBLIK (Teori dan Pergeseran Paradigma ke era Digital)

Edisi Revisi

ICONEG 2019

**Buku ini merupakan edisi pertama sebagai kepedulian penulis terhadap Administrasi Publik, (Teori dan Pergeseran Paradigma ke era Digital) yang banyak mengalami permasalahan dalam mencapai reformasi administrasi publik. Administrasi publik mempunyai tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepentingan publik. Isu penting yang tercakup didalamnya meliputi daya tanggap terhadap problem yang terjadi dalam berbagai skala, keterwakilan, keadilan, transparansi, akuntabilitas, marginalisasi, ketepatan dalam kebijakan, pelayanan publik dan sebagainya. Administrasi publik bertekad melakukan telaah-telaah ilmiah dalam administrasi publik sesuai perkembangan zaman sebagai bagian reformasi administrasi publik yang lebih efektif. Buku ini mengkaji beberapa aspek yang berhubungan dengan Administrasi Publik, yang diharapkan dapat memberikan implikasi positif dalam pelayanan publik. Aspek-aspek ini dibahas berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang telah ditetapkan dan pada akhirnya memunculkan konsep dan teori sebagai pengembangan ilmu administrasi publik dan bermanfaat bagi organisasi pemerintahan yang bersentuhan dengan pelayanan publik.**

**Kegagalan Indonesia memutus warisan kolonial dalam kehidupan birokrasi pemerintah telah ikut membentuk sosok birokrasi dan aparatur yang gagal mentransformasi dirinya sebagai agen pelayanan dan perubahan.**

**Wacana Gender dan Kehutanan Masyarakat secara umum sudah dikenal di masing-masing disiplin ilmu induknya, yakni Ilmu Sosial dan Kehutanan. Bahkan secara tersirat, program-program terkait hal tersebut telah menjadi program pembangunan di masing-masing sektor dengan dukungan wacana pembangunan global (MDGs). melalui buku ini, penulis mencoba mencari benang merah dua wacana tersebut yang notabene keduanya sama-sama sebagai wacana pinggiran di masing-masing sektor. Seperti disiratkan penulis, wacana gender selama ini hanya berkutat di masyarakat (urban maupun pedesaan) dan segala problematika, dari masalah ekonomi, KDRT, trafficking, hingga ke hal pribadi, yakni kesehatan reproduksi. Simak dalam buku ini, |Penerbit Deepublish, Deepublish, |**

**Buku ini mengkaji beberapa aspek yang behubungan dengan Reformasi Biokrasi Dalam Pelayanan Publik yang lebih banyak dikhususkan pelayanan one stop services system, yang diharapkan dapat memberikan implikasi positif dalam perizinan dan non perizinan. Serta sangat memberi manfaat dalam melengkapi literatur Biokrasi Publik, bagi mahasiswa program studi ilmu Ilmu Administrasi Publik maupun praktisi atau birokrat yang melaksanakan fungsi sebagai public services.**

**Etika Administrasi Publik**

**Manajemen Sumber Daya Manusia**

**Kinerja pengawasan DPRD**

**Jalan Sederhana Memahami Administrasi Publik Dan Bisnis: Antara Teori Dan Praktik**

**Festschrift untuk Sjamsiar Sjamsuddin**

**Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui REFORMASI BIROKRASI**

**Ketertarikan penulis untuk menulis buku dengan judul Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik □ Edisi Revisi ini berawal dari ranah administrasi publik sangat luas, kompleks, dan dinamis telah menimbulkan kesulitan amat besar untuk membangun teori tunggal sebagai satu-satunya teori yang mampu memberikan deskripsi dan eksplanasi yang komprehensif dan akurat terhadap berbagai permasalahan yang mucul. Kondisi ini akhirnya mendorong berkembangnya aneka ragam metodologi (pendekatan) dalam administrasi publik. setiap pendekatan dan teori, pada dasarnya merupakan hasil derivasi dari meta-teori yang melandasinya. Teori baru timbul sebagai hasil derivasi dari landasan meta-teori yang berbeda dengan teori lama sehingga perubahan dari teori satu ke teori berikutnya, seperti ditegaskan Thomas Khun, tidak sekedar bersifat revolusioner kumulatif tetapi justru lebih bersifat revolusioner paradigmatic.**

**Buku pelayanan prima instansi pemerintah ini mencoba mengungkapkan secara kritis bagaimana kondisi sebenarnya pelayanan prima di instansi pemerintah di Indonesia. di pahami pelayanan prima merupakan terjemahan istilah "excellent service" yang secara harfiah artinya pelayanan terbaik atau pelayanan yang sangat memuaskan. Disebut sangat**

memuaskan atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Sejatinya hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Di Indonesia sebagaimana diketahui bahwa pelayanan publik khususnya di kantor-kantor pemerintah belum semua mencapai pelayanan prima sebagaimana yang diharapkan. Terutama instansi-instansi pelayanan publik di pelosok-pelosok Tanah Air. Karena itu juga keterbatasan yang ada sehingga pelayanan prima belum memuaskan. Kendati demikian, banyak juga instansi-instansi pelayanan publik pemerintah di perkotaan telah mampu menerapkan pelayanan prima. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Untuk memahami lebih mendalam mengenai Pelayanan Keluarga Berencana, buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca khususnya bagi dosen, mahasiswa/i, dan praktisi kesehatan baik dokter, bidan, maupun masyarakat awam, karena di dalamnya dikupas tuntas tentang seluk beluk Pelayanan Keluarga Berencana, yang kemudian terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut: Bab 1 Konsep Kependudukan di Indonesia Bab 2 Masalah Kependudukan di Indonesia Bab 3 Perkembangan KB di Indonesia Bab 4 Program KB di Indonesia Bab 5 Program KIE dalam Pelayanan KB Bab 6 Pelayanan Kontrasepsi dengan berbagai Metode Bab 7 Cara Pembinaan Akseptor Bab 8 Dokumentasi dan Pelaporan Pelayanan KB Bab 9 Layanan Kesehatan Reproduksi dan KB.

Buku ini menjelaskan tentang karakteristik pelayanan publik yaitu prinsip dan komponen pelayanan, asas-asas pelayanan publik, strategi peningkatan pelayanan publik, usaha untuk meningkatkan semangat, tugas, fungsi, dan struktur organisasi pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, SOP Alur pelayanan administratif pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Good Governance dalam Pelayanan Publik

Antologi Administrasi Publik dan Pembangunan

Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan

Peduli Inklusif Dan Kolaborasi

**Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan, bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum, manakala ia tidak diperlaksanakan (lagi). Perkataan dari Satjipto Rahardjo itu adalah pelaksanaan dari hukum secara ideal, dan masih berlaku sampai sekarang. Pada saat sekarang ini dimana perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sangat cepat sebagai akibat dari pembangunan pada segala lini kehidupan termasuk dalam hukum, terkadang membawa dampak yang tidak selamanya positif terhadap perkembangan pembangunan tersebut. Hal ini bisa kita lihat dengan meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat di nilai pada saat ini sangat kurang pada dasarnya di sebabkan dari proses perkembangan masyarakat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Hal ini terjadi karena tidak di imbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.**

**#deepublish #Laurensius #Arliman #Penegakan #Hukum dan #Kesadaran #Masyarakat #Sekolah #Tinggi #Ilmu #Hukum #Padang #STIH**

Shadow Play Information Politics in Urban Indonesia University of Toronto Press

Buku ini menjelaskan tahapan-tahapan terjadinya reformasi birokrasi di Nusantara (Indonesia). Berbagai strategi dan upaya telah mulai diterapkan di berbagai daerah, terutama di kabupaten/kota yang memiliki tingkat sumber daya manusia yang memadai. Buku ini menjadi penting untuk dibaca karena tidak hanya berisi dinamika-dinamika reformasi birokrasi di beberapa daerah di Nusantara, akan tetapi pula memberikan informasi penting mengenai makna dan tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri. Sajian dalam buku ini sarat dengan informasi reformasi dan birokrasi yang terjadi selama 6 (enam) era kepemimpinan di Nusantara. Masing-masing kepemimpinan mempunyai nilai historis tersendiri dengan beberapa keunggulan yang ada dalam mengelola sistem pemerintahan selama menjabat sebagai kepala negara. Fenomena yang ada dapat pembaca tangkap dari setiap uraian yang terkandung di dalam pembahasannya. Buku ini menarik untuk dikaji dan dijadikan bahan diskusi untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi di Nusantara.